Journal Education and Government Wiyata ISSN 2986-5131
Volume 4 Nomor 3, Agustus 2026 (523-531)
https://journal.wiyatapublisher.or.id/index.php/e-gov

ANALISIS HUBUNGAN AKUNTABILITAS DAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT DI KOTA CILEGON

Dwi Lestari[1], Hasuri Waseh[2], Yeni Khoirunnisa Agustiani[3]
Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik,
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia [1,2,3]
Email: sypearlapril@gmail.com[1]

ABSTRAK

Tata kelola pemerintahan yang baik menjadi pilar penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Pelayanan informasi merupakan salah satu pelayanan publik yang krusial. Partisipasi masyarakat di Kota Cilegon masih belum optimal karena dipengaruhi oleh akuntabilitas dan keterbukaan informasi publik yang masih perlu perbaikan. Keterbatasan dalam penyajian informasi, platform digital yang masih sering error, dan fasilitas yang belum inklusif berpotensi menghambat partisipasi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh akuntabilitas dan keterbukaan informasi publik terhadap partisipasi masyarakat di Kota Cilegon. Penelitian ini menggunakan metode asosiatif dengan pendekatan kuantitatif berdasarkan teori akuntabilitas dari (Chandler dan Plano, 1988), keterbukaan informasi publik dari (Delone dan McLean, 1992), dan partisipasi masyarakat dari (Cohen dan Uphoff, 1980). Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui observasi, penyebaran angket, dan studi dokumentasi dengan sampel sebanyak 100 responden, kemudian dianalisis menggunakan SPSS 26.0. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh sebesar 60.7%, keterbukaan informasi publik sebesar 59.5%, dan secara simultan kedua variabel berpengaruh sebesar 70.6% terhadap partisipasi masyarakat. Hasil tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas yang terkoordinasi dan transparan dalam keterbukaan informasi publik berkontribusi terhadap peningkatan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, organisasi publik perlu membenahi asas penyelenggaraan pelayanan publik salah satunya yaitu akuntabilitas dan keterbukaan, agar pelayanan publik khsusnya pelayanan atas informasi dapat berjalan lebih optimal.

Kata Kunci: *Akuntabilitas, Keterbukaan Informasi Publik, Partisipasi Masyarakat.*

ABSTRACT

Good governance is a key pillar in the delivery of public services. Information services are among the most crucial public services. Public participation in Cilegon City is still not optimal because accountability and transparency in public information still need improvement. Limitations in the presentation of information, digital platforms that are still prone to errors, and facilities that are not yet inclusive have the potential to hinder public participation. This study aims to

analyze the influence of accountability and public information transparency on public participation in Cilegon City. This study employs an associative method with a quantitative approach based on the theory of accountability by Chandler and Plano (1988), the theory of public information transparency by Delone and McLean (1992), and the theory of public participation by Cohen and Uphoff (1980). Data for this study were collected through observation, questionnaire distribution, and a documentary review, with a sample of 100 respondents, and were subsequently analyzed using SPSS 26.0. The results of this study indicate that accountability has a 60.7% influence, public information transparency has a 59.5% influence, and, taken together, the two variables have a combined 70.6% influence on public participation. These results indicate that coordinated and transparent accountability in public information disclosure contributes to increased public participation. Therefore, public organizations need to improve the principles of public service delivery—specifically accountability and transparency—so that public services, particularly those related to information, can function more effectively.

Keyword: *Accountability, Public Information Transparency, Public Participation*

PENDAHULUAN

Melihat Indonesia sebagai negara demokrasi, *good* governance semestinya menjadi fondasi utama penyelenggaraan pemerintahan yang efektif di mana prinsip-prinsip *good governance* berperan sebagai pilar yang krusial dalam mewujudkan kepercayaan publik. Prinsip-prinsip *good governance* tidak hanya memperkuat pengawasan terhadap kinerja suatu organisasi, melainkan juga mendorong keterlibatan aktif dari masyarakat dalam berjalannya suatu negara. Tujuan *good governance* adalah mewujudkan birokrasi yang akuntabel dengan bertanggung jawab atas setiap tindakan yang diambil.

Pengimplementasian *good governance* dapat terwujud apabila aparatur pemerintah dan institusi publik secara keseluruhan dapat bersikap terbuka terhadap ide dan gagasan baru serta responsif terhadap kepentingan masyarakat.

Terdapat beberapa prinsip-prinsip *good governance* yang menjadi variabel dalam penelitian ini yang juga merupakan asas-asas dari pelayanan publik yaitu akuntabilitas, transparansi atau keterbukaan, dan partisipasi. Partisipasi masyarakat merupakan perwujudan dari badan publik yang menjalankan tugasnya dengan memegang teguh integritas, akuntabel serta terbentuknya keterbukaan informasi yang informatif dan responsif. Partisipasi masyarakat bukan hanya diukur pada saat keterlibatan itu hadir, melainkan juga dari hal yang memicunya, dalam hal ini yaitu akuntabilitas dan keterbukaan informasi publik. Dalam hal ini yang menjadi acuan partisipasi masyarakat yaitu akuntabilitas dan keterbukaan informasi publik yang dilaksanakan oleh Dinas

Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo) Kota Cilegon.

Ditinjau dari akuntabilitas pelayanan publik khususnya pelayanan informasi oleh Diskominfo Kota Cilegon dapat dilihat dari penyelenggaraan pelayanan publik hingga adanya survey kepuasan masyarakat. Tahun 2022, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Diskominfo Kota Cilegon sebesar 68.22 (kurang baik). Hal tersebut dapat didukung juga dengan laman resmi Diskominfo Kota Cilegon yang sering kali sulit diakses. Selain itu juga jenis layanan yang ada dalam laman resminya di tahun 2025 masih belum lengkap. Hal tersebut memicu rendahnya partisipasi masyarakat khususnya dalam layanan informasi.

Temuan selanjutnya didukung oleh skor indeks keterbukaan informasi publik Kota Cilegon yang fluktuatif dalam kurun waktu lima tahun terakhir yang dapat diinterpretasikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 1
Pemeringkatan Indek Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Kota Cilegon Tahun 2021 - 2025

No	Tahun	Rank	Nilai	Kualifikasi
1	2021	8	60.62	Cukup Informatif
2	2022	8	60.05	Cukup Informatif
3	2023	5	97.20	Informatif
4	2024	5	94.81	Informatif
5	2025	7	95.12	Informatif

Sumber: Diskominfo Provinsi, 2026

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan perolehan Kota Cilegon atas IKIP bersifat fluktuatif dengan adanya penurunan di tahun 2025. Meskipun angka yang diperoleh masih tinggi, namun Kota Cilegon merupakan Kota dengan perolehan IKIP terendah se Provinsi Banten. Hal tersebut perlu menjadi perhatian semua kalangan, karena keterbukaan informasi merupakan pilar penting bagi negara demokrasi guna menyeimbangkan penyelenggaraan pelayanan publik. Akuntabilitas yang masih perlu dibenahi dan keterbukaan informasi publik yang perlu dioptimalkan mampu berdampak pada partisipasi masyarakat.

Rumusan Masalah

1. Seberapa besar pengaruh akuntabilitas terhadap partisipasi masyarakat di Kota Cilegon?
2. Seberapa besar pengaruh keterbukaan informasi publik terhadap partisipasi masyarakat di kota cilegon?
3. Seberapa besar pengaruh akuntabilitas dan keterbukaan informasi publik terhadap partisipasi masyarakat di Kota Cilegon?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh akuntabilitas terhadap partisipasi masyarakat di Kota Cilegon?
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh keterbukaan informasi publik terhadap partisipasi masyarakat di kota Cilegon?
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh akuntabilitas dan

keterbukaan informasi publik terhadap partisipasi masyarakat di Kota Cilegon?

Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
   Sebagai pengembangan Ilmu dan pengetahuan khususnya Program Studi Administrasi Publik yang telah didapatkan selama masa perkuliahan. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi penelitian selanjutnya yang memiliki kesamaan fokus hingga kesamaan variabel penelitian.
2. Manfaat Praktis
   Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan saran, kritik, dan masukan guna meningkatkan kinerja dalam mengimplementasikan Akuntabilitas dan Keterbukaan Informasi Publik di Kota Cilegon sehingga meningkatkan partisipasi masyarakat.

KAJIAN PUSTAKA

1. Teori Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan atau membagikan penanggungjawaban atau menanggapi serta menerangkan kinerja serta aksi seorang pimpinan atau suatu unit organisasi kepada pihak yang mempunyai hak atau berwenang memohon pertanggungjawaban (Subroto, 2019). Lebih lanjut disampaikan oleh Chandler dan Plano (1988) yang menyatakan bahwa terdapat lima indikator dalam akuntabilitas, yang dimaknai bahwa lima indikator tersebut yang menjadi parameter penentu suatu akuntabilitas khususnya akuntabilitas pelayanan publik. Indikator-indikator tersebut diantaranya yaitu:

1. Akuntabilitas Fiskal
   Proses menunjukkan penggunaan dan pengelolaan sumber daya dan dana yang dimiliki oleh suatu pemerintah atau badan publik dalam bentuk laporan keuangan yang akurat, transparan, dan mengacu pada peraturan keuangan yang berlaku.
2. Akuntabilitas Legas
   Akuntabilitas legas dimaknai bahwa proses sertifikasi kepada pemerintah atau lembaga bahwa mereka mengikuti dan menerapkan hukum dan peraturan yang berlaku dalam semua keputusan dan tindakan.
3. Akuntabilitas Program
   Akuntabilitas Program dimaknai bahwa posisi dari pemangku kepentingan dan pihak berwenang bertanggung jawab untuk mengelola, mengembangkan dan memantau program atau inisiatif tertentu.
4. Akuntabilitas Proses
   Proses menunjukkan kepada pihak berwenang bahwa mereka bertanggung jawab untuk mengelola, mengembangkan dan memantau prosedur dan sistem kerja tertentu.
5. Akuntabilitas Outcome
   Akuntabilitas hasil memastikan bahwa semua pihak yang terlibat mengembangkan, mengelola dan memantau hasil dengan cara yang sistematis, menghubungkannya

dengan tujuan dan fokus pada kinerja yang diharapkan.

2. Keterbukaan Informasi Publik

Mardiasmo (2009) menjelaskan transparansi merupakan "Keterbukaan (opennesess) pemerintah dalam memberikan informasi terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Hal tersebut sejalan dengan amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mana setiap orang berhak mendapatkan Informasi Publik. Lebih lanjut disampaikan oleh DeLone and McLean (1992) mengatakan bahwa terdapat beberapa dimensi atau indikator yang dapat digunakan sebagai parameter dalam pengembangan alat ukur Keterbukaan Informasi Publik (KIP), yaitu:

1. Timeliness

Ketepatan waktu merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam menyajikan suatu informasi yang relevan. Tepat waktu disini yaitu jika informasi yang disajikan tersebut bertepatan pada saat informasi tersebut dibutuhkan,

2. Completeness

Indikator ini sangat penting dalam keterbukaan informasi publik sebab guna menjamin transparansi dan akses terbatas atas informasi yang dibatasi atau dikecualikan. transparansi dan akses terbatas atas informasi yang dibatasi atau dikecualikan. *Completeness* juga memastikan bahwa masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memahami dan memperbaiki proses pemerintahan, serta memperkenalkan reformasi jika diperlukan.

3. Reliability

Indikator memastikan bahwa informasi yang diertakan adalah akurat, relevan,dan faktual. Hal ini membantu mengurangi kekerasan dan dapat meningkatkan kualitas keputusan atas individu atau kelompok masyarakat maupun organisasi secara keseluruhan.

4. Accuracy.

Akurasi ini penting dilakukan guna memastikan bahwa informasi yang disebarkan atau dipublikasikan kepada masyarakat adalah informasi yang akurat dan benar.

3. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan suatu masyarakat dalam proses mengidentifikasi permasalahan dan peluang yang muncul dalam masyarakat. Lebih lanjut Cohen dan Uphoff (1980) membedakan partisipasi menjadi empat indikator yaitu:

1. Participation in Decision Making

Wujud partisipasi dalam pengambilan keputusan ini antara lain seperti ikut menyumbangkan gagasan atau pemikiran, kehadiran dalam rapat, diskusi dan tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan.

2. Participation in Implementation

Partisipasi dalam pelaksanaan merupakan kelanjutan dalam rencana yang telah digagas sebelumnya baik

yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan maupun tujuan.

3. Participation in Benefit

Partisipasi dalam pengambilan manfaat tidak lepas dari hasil pelaksanaan yang telah dicapai baik yang berkaitan dengan kualitas maupun kuantitas. Segi kualitas dapat dilihat dari *output*, sedangkan dari segi kuantitas dapat dilihat dari presentase keberhasilan program.

4. Participation in Evaluation

Partisipasi dalam evaluasi. Partisipasi dalam evaluasi ini berkaitan dengan pelaksanaan pogram yang sudah direncanakan sebelumnya.

Menurut Cohen dan Uphoff (1980) mengemukakan hal tersebut dikarenakan empat indikator itulah yang menjadi parameter atau tolak ukur pengukuran untuk partisipasi masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Meninjau hasil pengujian instrumen penelitian menggunakan bantuan aplikasi SPSS versi 26.0 didapatkan 25 jawaban valid, Hasil uji reliabilitas akuntabilitas (X1) sebesar 0.861, keterbukaan informasi publik (X2) sebesar 0.841, partisipasi masyarakat sebesar 0.869, serta hasil uji reliabilitas akuntabilitas (X1) dan keterbukaan informasi publik (X2) terhadap partisipasi masyarakat (Y) sebesar 0,946. sehingga dapat dikatakan reliabilitasnya tinggi hingga sangat tinggi. Selain itu juga, hasil uji normalitas menyatakan data berdistribusi normal. Di sisi lain, Hasil uji analisis koefisien korelasi sederhana antara X1 terhadap Y yaitu memiliki hubungan yang positif dengan korelasi sangat kuat dan satu arah karena memiliki nilai r sebesar 0.779 artinya jika akuntabilitas dapat dijalankan dengan baik maka akan meningkatkan partisipasi masyarakat. Hasil uji analisis koefisien korelasi sederhana antara X2 terhadap Y yaitu memiliki yang positif dengan korelasi sedang satu arah karena memiliki nilai r sebesar 0.529.

Merujuk pada hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa korelasi atau tingkat kekuatan hubungan antar variabel yaitu akuntabilitas (X1) dengan partisipasi masyarakat (Y) sebesar 0.779 atau korelasi sangat kuat. Kemudian, hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa korelasi atau tingkat kekuatan hubungan antar variabel yaitu keterbukaan informasi publik (X2) dengan partisipasi masyarakat (Y) sebesar 0.771 atau korelasi kuat. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa hubungan antar variabel ini kuat. Di sisi lain, uji t variabel X1 terhadap Y sebesar 0.000 < 0.05 dan nilai t hitung 6.138 > t tabel 2.051 dalam kata lain H0 ditolak dan H1 diterima, kemudian variabel X2 terhadap Y sebesar 0.000 < 0.05 dan nilai t hitung 5.795 > t tabel 2.051 sehingga dapat disimpulkan bahwa uji t variabel X2 terhadap Y sebesar 0.000 < 0.05 dan nilai t hitung 5.795 > t tabel 2.051 sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H2 diterima.

Hasil uji f menyatakan bahwa nilai signifikansi untuk pengaruh X1 dan X2 secara simultan atau gabungan terhadap Y yaitu sebesar 0.000 < 0.05 dan nilai F hitung 117.763 > F tabel 3.09 sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak atau H3 diterima, yang berarti secara simultan atau gabungan terdapat pengaruh yang positif dan signifikan pada variabel X1 (akuntabilitas) dan variabel X2 (keterbukaan informasi publik) terhadap Y (partisipasi masyarakat).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang peneliti lakukan mengenai Pengaruh Akuntabilitas dan Keterbukaan Informasi Publik terhadap Partisipasi Masyarakat di Kota Cilegon, peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, berdasarkan hasil pengolahan data pada variabel Akuntabilitas, mendapatkan hasil nilai signifikansi pada uji t hitung yaitu sebesar 0.000 < 0.05 dan nilai t hitung 6.138 > 2.051 sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima.

Kedua, berdasarkan hasil pengolahan data pada variabel Keterbukaan Informasi Publik, mendapatkan hasil signifikansi pada uji t hitung yaitu sebesar 0.000 < 0.05 dan nilai t hitung 5.795 > 2.051 sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H2 diterima.

Ketiga, berdasarkan hasil yang diperoleh dari variabel Akuntabilitas (X1) dan Keterbukaan Informasi Publik (X2) terhadap Partisipasi Masyarakat (Y) peneliti menemukan antara 2 variabel independen dan 1 variabel dependen tersebut, karena pada uji F hitung didapatkan hasil bahwa Sig untuk pengaruh X1 dan X2 secara simultan atau gabungan terhadap Y yaitu sebesar 0.000 < 0.05 dan nilai F hitung 117.763 > F tabel 3.09. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H3 diterima.

Saran

1. Bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian (Diskominfo) Kota Cilegon, penelitian ini diharapkan dapat menjadi gambaran untuk melaksanakan secara rutin dan merata melakukan sosialisasi minimal 3 bulan sekali terkait Keterbukaan Informasi Publik. Selanjutnya, Diskominfo Kota Cilegon juga harus menghadirkan website pada laman google dan mengupgrade informasi yang dipublikasi khususnya informasi publik yang memang sudah seharusnya dipublikasi sehingga seluruh elemen baik pemerintah, swasta maupun masyarakat dapat mengakses informasi melalui Diskominfo Kota Cilegon.
2. Bagi PPID Kota Cilegon, penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan informasi yang relevan, faktual, dan berkualitas kepada masyarakat yang membuat permohonan informasi publik secara *continue*. Kemudian, melakukan

pengecekan secara berkala apakah ada kendala eror dan sebagainya terkait website atau aplikasi pendukung atas pelayanan informasi secara online, Lalu, diharapkan PPID Kota Cilegon juga dapat mengupgrade website atau aplikasi pendudkung pelayanan informasi sehingga semua kalanagan termasuk kalangan disabilitas dapat mengakses bahkan membuat informasi secara online tanpa harus datang langsung ke tempat.

3. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memicu dan memacu turut aktif dalam memanfaatkan informasi publik yang disediakan pemerintah sebagai dasar dalam berpartisipasi. Selain itu, masyarakat perlu meningkatkan kepedulian terhadap penyelenggaraan pemerintahan dengan menyampaikan aspirasi, kritik, dan saran secara konstruktif melalui mekanisme yang tersedia, sehingga akuntabilitas pemerintah dan kualitas pelayanan publik dapat terus meningkat.
4. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat. Merujuk pada nilai koefisien korelasi menunjukkan bahwa masih terdapat faktor lain di luar penelitian ini yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat selain akuntabilitas dan keterbukaan informasi publik. Selain itu, penelitian selanjutnya juga disarnkan untuk menggunakan metode asosiatif, metode komparatif, dengan pendekatan campuran atau *mixed method* atau bisa juga dengan meneliti dengan lokus yang berbeda sehingga dapat melihat penelitian dari sudut pandang lain yang lebih komprehensif tentang suatu hal yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Aisyah. Nur, dkk. (2023). Implementasi Keterbukaan Informasi Publik dalam pembangunan dana desa di kecamatan Tanete Rilau kabupaten Barru. *Jurnal Unismuh, 4 (3).*

Cohen, J., & Uphoff, N. (1980). *Participation's Place in Rural Development: Seeking Clarity Through Specificity*. World Development, 8, 213-235.

Chandler, Ralph C., dan Plano, Jack C. (1988). *The Public Administration Dictionary*. Universitas Michigan: ABC-Clio.'

DeLone, W., & McLean E.R. (1992). *Information system success: The Quest for the dependent variabel.* Information System Research.

Fachrudin, R., Respaty, E., Adilah, I. S., & Sinlae, F. (2024). Peranan Penting Manajemen Sekuriti di Era Digitalisasi. Nusantara. *Journal of Multidisciplinary Science, 1(6).*

Komisi Informasi Pusat (2025).

Pedoman Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Tahun 2025. Diakses dari Ymq22zzYbjdM8et0IUyJZErATgCBafvbAnNQIwon.pdf

Lihawa, N.I.P., dkk. (2025). Pengaruh Transparansi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jambura Accounting Review, 6(1)*.

Sihaan, P.I.A., dan Tituk D.W. (2022). Pengaruh Akuntabilitas dan Partisipasi masyarakat Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pencapaian *Good Governance* pada Desa di Kecamatan Air Batu. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan, 4(11)*.

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D.*Bandung: IKAPI

Waluyo. (2007). *Manajemen Publlik (Konsep, Aplikasi dan Implementasinya Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah).* Bandung: Mandar Maju.